

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Responden

Sebelum penulis membahas dan menganalisa lebih lanjut tentang Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Pembinaan Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, maka terlebih dahulu penulis memaparkan identitas reponden yang didefenisikan, adalah sebagai berikut:

5.1.1. Responden Menurut Jenis Kelamin

Untuk mengetahui lebih jelas mengetahui identitas responden berikut ini penulis akan menguraikan mengenai identitas responden menurut jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.9 Jenis Kelamin Responden

No	Jenis kelamin	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	17	37,93 %
2	Perempuan	27	62,07 %
Jumlah		44	100%

Sumber : Data Olahan 2014

Dari tabel 5.9 diatas dapat diketahui bahwa jumlah sampel untuk responden sebanyak 44 orang yang keseluruhannya terdiri dari 17 responden laki-laki atau 37,93 %, sedangkan responden perempuan sebanyak 27 responden atau 62,07 %. Jadi jumlah keseluruhan responden yang dijadikan sampel adalah 44 orang.

5.1.2. Responden Menurut Tingkat Usia

Secara teoritis faktor usia mempengaruhi seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Demikian pula dalam menentukan pilihan, usia akan memberikan pengaruh, semangkin tinggi tingkat usia semakin baik karena tingkat kematangan emosi seseorang dalam berfikir. Selanjutnya tingkat usia juga akan mempengaruhi seseorang melakukan setiap aktifitas dalam kehidupannya. Karena itu tingkat usia selalu dijadikan indikator dalam menentukan produktif atau tidaknya seseorang. Faktor usia juga mempengaruhi pola pikir dan standar kemampuan fisik dalam suatu pekerjaan tingkat usia responden dapat dilihat dari tabel 5.10 di bawah ini:

Tabel 5.10 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Usia	Jumlah Orang	Persentase (%)
1	15 – 20	10	22,72 %
2	21 – 25	4	9,09 %
3	26 – 30	14	31,82 %
4	31 – 35	8	18,18 %
5	36 – 40	2	4,55 %
6	41 – 45	2	4,55%
7	46 – 50	1	2,27 %
8	51 – 55	3	6,82 %
Jumlah		44	100 %

Sumber : Data Olahan 2014

Dari tabel 5.10 diatas dapat dilihat bahwa responden yang terbanyak adalah berumur 26-30 tahun dengan persentase 31,82 %. Sedangkan yang paling sedikit yaitu antara umur 46-50 tahun sebanyak 1 orang dengan persentase 2,27 %. Jadi dapat dikatakan bahwa responden dalam penelitian ini adalah mereka

yang berusia diatas 26 tahun ke atas, dan dapat diasumsikan tidak ada masalah dalam kuaslitas dan produktifitas kerja.

5.1.3. Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagai bahan pertimbangan untuk mempedomani segala sesuatu yang menyangkut dengan keterangan, tanggapan, dan jawaban-jawaban yang diberikan responden pada masalah variabel penelitian maka penulis terlebih dahulu melihat dari segi latar belakang tingkat pendidikan responden, dapat dilihat pada tabel 5.11 dibawah ini:

Tabel 5.11 Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No	Responden	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	SD	10	22,73 %
2	SMP	0	0 %
3	SMA	1	2,27 %
4	D III	1	2,27 %
5	S1	31	70,46 %
6	S2	1	2,27%
7	S3	0	0 %
Jumlah		44	100 %

Sumber : Data Olahan 2014

Dari tabel 5.11 diatas, dapat dilihat bahwa responden yang terbanyak adalah Strata 1 (S1) sebanyak 31 orang (70,46%), sedangkan yang paling sedikit yaitu tingkat SMA, Diploma 3 (D3) dan Strata 2 (S2) sebanyak 1 orang (2,27%), maka dapat diakumulasikan bahwa tingkat pendidikan Strata 1 (S1) lebih dominan, artinya labih banyak yang mengetahui dan menyadari dari Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.

5.2. Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Pembinaan Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya roda pemerintahan dengan baik. Pemerintah dari tugas dan kewajibannya bertanggung jawab untuk memberikan arah dan kebijakan. Dalam Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Pembinaan Madrasah Tsanawiyah Al-Qaimiyah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang pendidikan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.

Selanjutnya untuk mengetahui Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Pembinaan Madrasah Tsanawiyah Al-Qaimiyah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ditetapkan beberapa indikator yang relevan, yang pembahasannya dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut :

5.2.1 Kebijakan

Nyimas Dwi Koryati (2005:7) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan pengembangan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan aparaturnya yang mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.

Dalam melakukan pembuatan kebijakan, seorang pemimpin dalam hal ini Dinas Pendidikan memiliki tugas yang harus dilakukan. Salah satunya adalah tugas Kepala Dinas Pendidikan membuat kebijakan pelaksanaan ujian nasional yang bertujuan pemerataan pelaksanaan ujian nasional. Pernyataan kebijakan pelaksanaan ujian nasional yang di berlakukan pada Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau tergolong cukup baik dimana dari 44 jumlah responden 27 orang yang menjawab Ya dengan persentase 61,36 %, sedangkan yang menjawab Tidak berjumlah 11 orang dengan persentase 25 % dan yang menjawab Tidak tahu sebanyak 6 orang dengan persentase 13,64 %. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 5.12 dibawah ini :

Tabel 5.12 Tanggapan Responden Mengenai Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Kebijakan Pelaksanaan Ujian Nasional Berjalan Lancar Di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Ya	27	61,36 %
2	Tidak	11	25 %
3	Tidak Tahu	6	13,64 %
Jumlah		44	100%

Sumber : Data Olahan 2014

Dari tabel 5.12 diatas menunjukkan bahwa kebijakan pelaksanaan ujian nasional di Madrasah Tsanawiyah Al-qasimiyah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sesuai dengan kebutuhan madrasah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Kepala Dinas Kabupaten Pelalawan yaitu Bapak MD.RIZAL,S.Pd,M.Pd, dapat dilihat pada kutipan langsung wawancara

penulis dengan Bapak MD.RIZAL,S.Pd,M.Pd pada Tanggal 10 Maret 2014, beliau mengatakan:

“kebijakan untuk pelaksanaan ujian nasional memang menjadi tanggung jawab pemerintah yaitu dinas pendidikan. Maka dari itu kami membuat suatu kebijakan agar ujian nasional berjalan lancar dan baik untuk sekolah umum maupun madrasah. Kebijakan itu sesuai dengan Standar SOP (standar operasional pendidikan) kemudian baru disosialisasikan di sekolah atau pun madrasah, termasuk di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan mengenai pengangkatan tenaga honorer di Madrasah Tsanawiyah Al-qasimiyah belum mencukupi dari yang dibutuhkan Madrasah Tsanawiyah Al-qasimiyah, dimana sebanyak 18 responden (40,90%) menjawab Ya, 22 responden (50%) menjawab Tidak dan 4 responden (9,10%) menjawab Tidak tahu. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 5.13 di bawah ini:

Tabel 5.13 Tanggapan Responden Mengenai Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Pengangkatan Tenaga Honorer Sudah Mencukupi di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Ya	18	40,90%
2	Tidak	22	50 %
3	Tidak Tahu	4	9,10 %
Jumlah		44	100%

Sumber : Data Olahan 2014

Dari tabel 5.13 dapat dilihat bahwa Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan mengenai pengangkatan tenaga honorer tergolong kurang berperan,

dimana sebanyak 18 orang mengatakan Ya, 22 orang mengatakan Tidak dan 4 orang mengatakan Tidak tahu.

Berdasarkan pengamat penulis ditempat penelitian, bahwasanya pengangkatan tenaga pendidik honorer Pemerintah Daerah (PEMDA) di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah Kecamatan Pangkalan Kuras memang tergolong kurang, karena dari 31 jumlah tenaga pendidik 3 orang PNS, 4 orang tenaga honorer Pemerintah Daerah dan selebihnya honor sekolah.

Dari penjelasan hasil penelitian diatas, dapat dianalisis bahwa Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam pengangkatan tenaga honorer di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau tergolong belum maksimal. Analisa ini didukung oleh pendapat Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah yaitu ibu Hj. Rosdiana,S.Ag, dapat dilihat pada kutipan langsung wawancara penulis dengan ibu Hj.Rosdiana,S.Ag, pada Tanggal 16 Maret 2014, beliau mengatakan:

“...jika bicara tentang tenaga honorer di madrasah ini, memang belum mencukupi. Kalau pun kami mendapatkan dana untuk tenaga pendidik honorer, itu bukan dari Dinas Pendidikan kabupaten pelalawan melainkan dana ibah dari pemerintah kabupaten.”

Kemudian pernyataan mengenai kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan dalam mengalokasikan dana imbal swadaya di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau tergolong kurang, dimana 15 responden (34,10%) menyatakan Ya, 24 responden menyatakan tidak dan 5 responden menyatakan Tidak tahu. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel 5.14 dibawah ini:

Tabel 5.14 Tanggapan Responden Mengenai Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Mengalokasikan Dana Imbal Swadaya di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Ya	15	34,10 %
2	Tidak	24	54,54 %
3	Tidak Tahu	5	11,36 %
Jumlah		44	100%

Sumber : Data Olahan 2014

Dari tabel 5.14 dapat diketahui bahwa kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan dalam mengalokasikan dana imbal swadaya di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau tergolong kurang, dimana sebanyak 25 orang menyatakan Ya, 24 orang menyatakan Tidak dan 5 orang menyatakan Tidak tahu.

Dari hasil tanggapan responden pada tabel 5.14, penulis dapat menganalisa bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam mengalokasikan dana imbal swadaya di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau tergolong kurang. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan kepala sekolah Ibu Hj.Rosdiana.S,Ag, pada Tanggal 10 Maret 2014, beliau mengatakan:

“Memang ada dana imbal swadaya yang di berikan oleh pemerintah kabupaten yaitu dana pembuatan labor komputer dan perpustakaan tetapi untuk pembangunan bangunan sekolah pemerintah tidak ada membantu atau pemerintah daerah kabupaten pelalawan khususnya Dinas Pendidikan kabupaten pelalawan kurang berperan dalam hal dana imbal swadaya ini”

Tabel 5.15 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Hal Kebijakan Terhadap Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah

No	Sub Indikator	Pengukuran			Jumlah
		Ya	Tidak	Tidak Tahu	
1	Kebijakan pelaksanaan ujian nasional	27 (61,36%)	11 (25%)	6 (13,64%)	44 100%
2	Pengangkatan tenaga pendidik honorer	18 (40,90%)	22 (50%)	4 (9,10%)	44 100%
3	Imbal swadaya	15 (34,10%)	24 (54,54%)	5 (11,36%)	44 100%
	Jumlah	60	57	15	132
	Rata – rata	20	19	5	44
	Persentase	45,46%	43,18%	11,36%	100%

Sumber : Data Olahan 2014

Dari hasil rekapitulasi tanggapan responden terhadap Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam hal kebijakan terhadap Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah dapat disimpulkan sebanyak 20 responden (45,46%) menyatakan Ya, hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan berperan dalam memberikan kebijakan, 19 responden (43,18%) menyatakan Tidak, hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan masih dinyatakan kurang berperan terhadap pemberian kebijakan, sedangkan 5 responden (11,36%) menyatakan Tidak tahu, hal ini membuktikan bahwa masih ada responden yang tidak mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan tabel 5.15 penulis menyimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan masih tergolong kurang. Hal ini

disebabkan oleh kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan terhadap Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah.

5.2.2 Pemberian Pedoman

Pedoman adalah acuan tertulis yang bersifat umum dalam melaksanakan tugas. Dari defenisi ini maka suatu organisasi baik privat maupun publik ketika ingin mencapai tujuan tentu sangat memerlukan pedoman. Begitu juga dengan Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah, salah satunya adalah memberikan pedoman ujian nasional, kriteria penempatan tenaga honorer dan imbal swadaya.

Dari pernyataan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan memberikan acuan tertulis sebagai pedoman sebelum ujian nasional, sebanyak 26 orang (59,09%) menyatakan Ya, 12 orang (27,27 %) menyatakan Tidak, dan 6 orang (13,64 %) menyatakan Tidak tahu. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 5.16 di bawah ini :

Tabel 5.16 Tanggapan Responden Mengenai Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Pemberian Pedoman Sebagai Acuan Tertulis Ujian Nasional di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Ya	26	59,09%
2	Tidak	12	27,27 %
3	Tidak Tahu	6	13,64 %
Jumlah		44	100%

Sumber : Data Olahan 2014

Dari tabel 5.16 diatas dapat membuktikan bahwa peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan memberikan acuan tertulis pada madrasah sebagai

pedoman ujian nasional, dimana dari 44 responden 26 yang mengatakan Ya (59,09%) atau lebih dari separoh jumlah responden.

Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan yaitu Bapak MD. Rizal, S.Pd, M.Pd, dapat dilihat pada kutipan langsung wawancara penulis dengan Bapak MD. Rizal, S.Pd, M.Pd pada Tanggal 10 Maret 2014, beliau mengatakan :

“ sebenarnya pemberian acuan tertulis sebagai pedoman ujian nasional itu memang sudah menjadi kewajiban dari dinas pendidikan, dengan demikian seluruh ujian nasional yang ada di kabupaten pelalawan bisa berjalan sama rata. sehingga bisa terarah dengan baik dan lancar, ini merupakan keinginan dari kami serta dari kita semua.”

Selain itu, diperkuat oleh pernyataan dari Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah Ibu Hj. Rosdiana, S.Ag, tentang pentingnya pemberian pedoman sebelum ujian nasional di adakan, wawancara ini dilakukan pada Tanggal 16 Maret 2014 :

“ kami dari pihak Madrasah merasa terbantu dengan diberikannya pedoman sebelum ujian nasional, sehingga ujiannya bisa terlaksana secara baik dan sesuai dengan yang di inginkan”.

Untuk mengetahui peranan pemerintah daerah kabupaten pelalawan memberikan acuan tertulis tentang kriteria penempatan tenaga honorer di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah, dapat di ketahui dari tanggapan responden dilihat dari tabel 5.17 dibawah ini :

Tabel 5.17 Tanggapan Responden Mengenai Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Memberikan Acuan Tertulis Tentang Kriteria Penempatan Tenaga Honoror di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Ya	17	38,64%
2	Tidak	24	54,54 %
3	Tidak Tahu	3	6,82%
Jumlah		44	100%

Sumber : Data Olahan 2014

Dari tabel 5.17 diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden mengenai peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, dalam memberikan acuan tertulis tentang kriteria penempatan tenaga honoror di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah, dimana dari 44 responden, 17 responden (38,64%) menyatakan Ya, 24 responden (54,54 %) menyatakan Tidak dan 3 responden (6,82%) menyatakan Tidak tahu sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar dari responden berpendapat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan belum maksimal dalam memberikan acuan tertulis tentang kriteria penempatan tenaga honoror.

Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah Ibu Hj. Rosdiana, S.Ag, tentang Kriteria Penempatan Tenaga Honoror. Yang diutarakannya pada Tanggal 16 Maret 2014 :

“memang Pemerintah Daerah Kabupaten sudah memberikan acuan tertulis tentang kriterian tenaga honoror. kemudian kami ajukan beberapa orang dari majelis guru untuk menjadi honor PEMDA. namun sampai saat ini belum ada respon/ tanggapan dari pemerintah daerah Padahal syarat dan kriterianya sudah sesuai dan kami penuhi bahwa untuk

menjadi tenaga Honorer paling tidak memegang gelar S1 dan dilihat juga dari lamanya pengabdian atau masa kerja di pendidikan tersebut”

Selanjutnya dalam hal peranan pemerintah daerah tentang acuan tertulis sebagai pemberian pedoman dalam penggunaan dana imbal swadaya di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah dapat dilihat dari tabel 5.18 dibawah ini :

Tabel 5.18 Tanggapan Responden Mengenai Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Memberikan Acuan Tertulis Dalam Penggunaan Dana Imbal Swadaya di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Ya	15	34,10 %
2	Tidak	24	54,54 %
3	Tidak Tahu	5	11,36 %
Jumlah		44	100%

Sumber : Data Olahan 2014

Dari tabel 5.18 diatas dapat dilihat bahwa dari 44 responden, 15 responden (34,10 %) mengatakan Ya, 24 responden (54,54 %) mengatakan Tidak, dan 5 responden (11,36 %) yang mengatakan Tidak tahu. Dengan demikian penulis dapat menganalisa bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan masih tergolong kurang berperan dalam hal Memberikan Acuan Tertulis tentang Penggunaan Dana Imbal Swadaya.

Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah Ibu Hj. Rosdiana, S.Ag, tentang acuan tertulis dalam penggunaan dana imbal swadaya Yang diutarakannya pada Tanggal 16 Maret 2014 :

“pemberian pedoman untuk pengelolaan imbal swadaya memang ada diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, tetapi hanya satu

kali yaitu pada tahun 2006 lalu, berupa material untuk pembangunan labor komputer dan pembangunan perpustakaan. Namun setelah itu tidak ada lagi bantuan imbal swadaya yang di berikan pemerintah daerah terhadap pembangunan pendidikan di Madrasah ini”

Tabel 5.19 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Hal Pemberian Pedoman Sebagai Acuan Tertulis di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah.

No	Sub Indikator	Pengukuran			Jumlah
		Ya	Tidak	Tidak Tahu	
1	Pemberian pedoman sebelum ujian nasional	26 (59,09%)	12 (27,27%)	6 (13,64%)	44 100%
2	Memberikan pedoman tentang kriteria tenaga honorer	17 (38,64%)	24 (54,54%)	3 (6,82%)	44 100%
3	Memberikan pedoman imbal swadaya	15 (34,10%)	24 (54,54%)	5 (11,36%)	44 100%
	Jumlah	58	60	14	132
	Rata – rata	19,33	20	4,67	44
	persentase	43,93%	45,46%	10,61%	100%

Sumber : Data Olahan 2014

Dari hasil rekapitulasi tanggapan responden terhadap Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam pemberian pedoman sebagai acuan tertulis pada Tabel 5.19 diatas, dapat disimpulkan dari 44 responden 19 orang (43,93%) menyatakan Ya, hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pelalawan berperan dalam pemberian pedoman sebagai acuan tertulis, 20 orang (45,46%) menyatakan Tidak, hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten masih tergolong kurang berperan terhadap pemberian pedoman sebagai acuan tertulis, sedangkan 5 orang (10,61%) menyatakan Tidak tahu, hal ini menyatakan

masih ada responden belum mengetahui tentang pemberian pedoman sebagai acuan tertulis di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah.

5.2.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah berjalannya program-program yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan seperti pengawasan ujian nasional, memperhatikan kesejahteraan tenaga honorer, dan mengawasi pelaksanaan pengalokasian dana imbal swadaya. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan bertanggung jawab dalam menyikapi segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah.

Pernyataan responden mengenai pengawasan dalam pelaksanaan ujian nasional di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah, dimana 25 responden (56,82 %) menjawab Ya, 18 responden (40,91%) menjawab Tidak, dan 1 responden (2,27 %) menjawab Tidak tahu. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 5.20 dibawah ini :

Tabel 5.20 Tanggapan Responden Mengenai Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Mengawasi Pelaksanaan Ujian Nasional di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Ya	25	56,82 %
2	Tidak	18	40,91%
3	Tidak Tahu	1	2,27 %
Jumlah		44	100%

Sumber : Data Olahan 2014

Dari tabel 5.20 diatas dapat dilihat bahwa dari 44 responden, sebanyak 25 orang mengatakan Ya, 18 orang mengatakan Tidak, dan 1 orang mengatakan

Tidak tahu. Dapat dianalisa bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan berperan dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan ujian nasional di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis pada Tanggal 10 Maret 2014, terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan yaitu Bapak MD. Rizal, S. Pd. M.Pd. Beliau menyatakan bahwa :

“pemerintah daerah jelas sudah memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan ujian nasional di tiap-tiap pendidikan yang ada di kabupaten pelalawan. Termasuk memberikan pengawasan ujian nasional di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah, hal ini dilakukan agar proses ujian nasional bisa berlangsung secara sama atau merata di setiap Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, serta bisa berjalan dengan baik”.

Dari hasil tanggapan responden mengenai peranan Pemerintah Daerah Pelalawan dalam memperhatikan kesejahteraan tenaga honorer di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah, dimana 14 responden (31,82 %) mengatakan Ya, 23 responden (52,27 %) mengatakan Tidak, dan 7 responden (15,91 %) mengatakan Tidak tahu. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 5.21 di bawah ini:

Tabel 5.21 Tanggapan Responden Mengenai Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Memperhatikan Kesejahteraan Tenaga Honorer di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Ya	14	31,82 %
2	Tidak	23	52,27 %
3	Tidak Tahu	7	15,91 %
Jumlah		44	100%

Sumber : Data Olahan 2014

Dari tabel 5.21 diatas penulis dapat menganalisa bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan kurang berperan dalam memberikan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga honorer di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Sekolah yaitu Ibu Hj. Rosdiana, S. Ag. Dalam wawancara pada tanggal 16 Maret 2014, beliau mengatakan :

“di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah ini sebenarnya sudah ada 4 orang tenaga honorer, tapi dihitung dari tingkat kesejahteraan para guru memang masih kurang. Sebab dari 31 tenaga pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah, hanya 4 orang saja yang di angkat menjadi tenaga honorer pemerintah daerah kabupaten inipun hasil kerja keras dan kerja sama dari kemenag”.

Selanjutnya pernyataan tentang tanggapan responden mengenai peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam mengawasi pelaksanaan pengalokasian dana imbal swadaya, dimana dari 44 responden, 17 orang (38,64 %) menyatakan Ya, 25 orang (56,82 %) menyatakan Tidak, dan 2 orang (4,54%) menyatakan Tidak tahu. Dapat dilihat dari tabel 5.22 di bawah ini :

Tabel 5.22 Tanggapan Responden Mengenai Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Pengawasan Pelaksanaan Dana Imbal Swadaya di Madarasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Ya	17	38,64 %
2	Tidak	25	56,82 %
3	Tidak Tahu	2	4,54 %
Jumlah		44	100%

Sumber : Data Olahan 2014

Dari tabel 5.22 diatas penulis dapat menganalisa bahwa Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam memberikan pengawasan

terhadap pelaksanaan pengalokasian dana imbal swadaya di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah ini, masih tergolong kurang.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari hasil wawancara pada Tanggal 16 Maret 2014, oleh Ibu Hj. Rosdiana, S. Ag, selaku kepala sekolah. Beliau mengatakan bahwa :

“Kuranginya perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam pengalokasian dana imbal swadaya, sehingga membuat pembangunan di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah lambat.

Tabel 5.23 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Hal Pelaksanaan Program di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah

No	Sub Indikator	Pengukuran			Jumlah
		Ya	Tidak	Tidak Tahu	
1	Pengawasan ujian nasional	25 (56,82%)	18 (40,91%)	1 (2,27%)	44 100%
2	Memperhatikan kesejahteraan tenaga honorer	14 (31,82%)	23 (52,27%)	7 (15,91%)	44 100%
3	Mengawasi pelaksanaan pengalokasian dana imbal swadaya	17 (38,64%)	25 (56,82%)	2 (4,54%)	44 100%
	Jumlah	56	66	10	123
	Rata – rata	18,67	22	3,33	44
	persentase	42,43%	50%	7,57%	100%

Sumber : Data Olahan 2014

Dari tabel 5.23 diatas dapat dilihat hasil rekapitulasi tanggapan responden terhadap Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam hal pelaksanaan program di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah, dari 44 responden, 19 orang (42,43%) menyatakan Ya, hal ini membuktikan bahwa Pemerintah

Kabupaten Pelalawan berperan dalam pelaksanaan program di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah, 22 orang (50%) menyatakan Tidak, hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten masih tergolong kurang berperan terhadap pelaksanaan program di Madrasah, sedangkan 3 orang (7,57%) menyatakan Tidak tahu, hal ini membuktikan masih ada responden yang belum mengetahui tentang pelaksanaan program di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah.

Berdasarkan tabel 5.23 penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Pelalawan masih kurang baik dalam pelaksanaan program pembinaan di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

5.2.4 Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan untuk meninjau kembali tentang pelaksanaan ujian nasional, meninjau kembali pelaksanaan kerja tenaga honorer dan meninjau kembali pelaksanaan dari hasil imbal swadaya.

Dari pernyataan tanggapan responden mengenai Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan meninjau kembali pelaksanaan ujian nasional di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah, dimana sebanyak 27 responden (61,37%) menyatakan Ya, 12 responden (27,27%) menyatakan Tidak dan 5 responden (11,36%) menyatakan Tidak tahu. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 5.24 berikut ini:

Tabel 5.24 Tanggapan Responden Mengenai Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Meninjau Kembali Pelaksanaan Ujian Nasional di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Ya	27	61,37 %
2	Tidak	12	27,27 %
3	Tidak Tahu	5	11,36 %
Jumlah		44	100%

Sumber : Data Olahan 2014

Dari tabel 5.24 diatas penulis dapat menganalisa bahwa Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam mengevaluasi ujian nasional di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah tergolong cukup baik.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis pada Tanggal 10 Maret 2014, terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan yaitu Bapak MD. Rizal, S. Pd. M.Pd. Beliau mengatakan bahwa :

“kami dari Dinas Pendidikan melakukan evaluasi pelaksanaan ujian nasional ini, untuk mengetahui apakah ujian nasional disetiap sekolah baik itu sekolah umum ataupun madrasah berjalan baik atau ada masalah, salah satunya seperti: pengawas ujian nasional yang longgar, pendistribusian soal yang lambat, soal yang kurang dari jumlah siswa, soal yang rusak atau salah dll. Dengan melakukan evaluasi inilah kami dapat mengetahuinya, sehingga hal yang sama tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.”

Selanjutnya pernyataan responden mengenai Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Meninjau Kembali Kerja Tenaga Honorer di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah, dimana 13 responden (29,55%) menyatakan Ya, 24 responden (54,54%) menyatakan Tidak dan 7 responden menyatakan Tidak tahu. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 5.25 dibawah ini:

Tabel 5.25 Tanggapan Responden Mengenai Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Meninjau Kembali Kerja Tenaga Honorer di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Ya	13	29,55 %
2	Tidak	24	54,54 %
3	Tidak Tahu	7	15,91 %
Jumlah		44	100%

Sumber : Data Olahan 2014

Dari tabel 5.25 diatas dapat dilihat bahwa peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam mengevaluasi kerja tenaga honorer di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasiniyah masih kurang.

Dari hasil tanggapan responden pada tabel 5.25, penulis dapat menganalisa bahwa Peranan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam mengevaluasi kerja tenaga honorer di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah masih kurang dan harus diperhatikan lagi, sehingga kerja dari tenaga honorer tersebut dapat terpantau, apakah kerja dari tenaga honorer ini baik atau tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Selanjutnya pernyataan tentang Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam meninjau kembali pelaksanaan pembangunan dari hasil dana imbal swadaya di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah, 14 responden (31,82 %) menyatakan Ya, 27 responden (61,36 %) menyatakan Tidak dan 3 responden (6,82 %) menyatakan Tidak tahu, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 5.26 di bawah ini :

Tabel 5.26 Tanggapan Responden Mengenai Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Meninjau Kembali Pelaksanaan Pembangunan Dari Hasil Imbal Swadaya di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Ya	14	31,82 %
2	Tidak	27	61,36 %
3	Tidak Tahu	3	6,82 %
Jumlah		44	100%

Sumber : Data Olahan 2014

Dari tabel 5.26 diatas penulis dapat menganalisa bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan kurang berperan dalam meninjau kembali dalam pelaksanaan pembangunan dari hasil imbal swadaya di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis terhadap Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah Ibu Hj. Rosdiana, S.Ag, pada Tanggal 16 Maret 2014 sebagai berikut:

“.....memang Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan telah memberikan imbal swadaya untuk membangun labor komputer dan perpustakaan di madrasah ini, tetapi sejak pembangunan labor komputer dan perpustakaan itu ,Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan tidak ada meninjau kembali madrasah ini dari segi sarana dan prasarana. Sehingga madrasah ini bisa dibilang kurang dari segi sarana dan prasaran”

Tabel 5.27 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Hal Evaluasi Pelaksanaan Program di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah

No	Sub Indikator	Pengukuran			Jumlah
		Ya	Tidak	Tidak Tahu	
1	Meninjau kembali pelaksanaan ujian nasional	27 (61,37%)	12 (27,27%)	5 (11,36%)	44 100%
2	Meninjau kembali pelaksanaan kerja tenaga honorer	13 (29,55%)	24 (54,54%)	7 (15,91%)	44 100%
3	Meninjau kembali pelaksanaan pembangunan dari hasil dana imbal swadaya	14 (31,82%)	27 (61,36%)	3 (6,82%)	44 100%
	Jumlah	54	63	15	144
	Rata – rata	18	21	5	44
	persentase	40,91%	47,73%	11,36%	100%

Sumber : Data Olahan 2014

Dari hasil rekapitulasi tanggapan responden terhadap Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam hal evaluasi pelaksanaan program di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah pada tabel 5.27, dapat disimpulkan sebanyak 18 responden (40,91%) menyatakan Ya, hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan berperan dalam hal evaluasi pelaksanaan program di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah, 21 responden (47,73%) menyatakan Tidak, hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan kurang berperan dalam hal evaluasi di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah dan 5 responden (11,36%) menyatakan Tidak tahu, hal ini menyatakan masih ada responden belum mengetahui tentang evaluasi pelaksanaan program di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah.

Berdasarkan tabel 5.27 diatas dapat diambil kesimpulan bahwa peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan masih tergolong kurang dalam hal evaluasi dari pelaksanaan program di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah.

5.3 Rekapitulasi Data

Dari indikator-indikator variabel pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan rekapitulasi tanggapan responden terhadap empat aspek yang diperhatikan dalam Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam pembinaan Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau pada tabel 5.28 di bawah ini :

Tabel 5.28 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Pembinaan Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

No	Indikator	Tanggapan responden			Jumlah
		Ya	Tidak	Tidak tahu	
1	Kebijakan	20	19	5	44
		45,46%	43,18%	11,36%	100%
2	Pemberian pedoman	19	20	5	44
		43,93%	45,46%	10,61%	100%
3	Pelaksanaan	19	22	3	44
		42,43%	50%	7,57%	100%
4	Evaluasi	18	21	5	44
		40,91%	47,73%	11,36%	100%
	Jumlah	76	82	18	176
	Rata-rata	19	20,5	4,5	44
	Persentase	43,18%	46,59%	10,23%	100%

Sumber : Data Olahan 2014

Dari tabel 5.28 diatas dapat diketahui bahwa rekapitulasi tanggapan responden berdasarkan indikator-indikator tentang Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam pembinaan Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, sebanyak 19 responden menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan berperan dalam pembinaan Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, 21 responden menyatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan kurang berperan dalam pembinaan Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan 4 responden menyatakan tidak tahu tentang Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam pembinaan Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Untuk lebih jelasnya dalam persentase tersebut, maka digunakan skor yaitu :

Jawaban Ya = 3

Jawaban Tidak = 2

Jawaban Tidak tahu = 1

Persentase rekapitulasi hasil angket Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam pembinaan Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau adalah :

- 1) Untuk alternatif jawaban nilai Ya = $3 \times 76 = 228$
 - 2) Untuk alternatif jawaban nilai Tidak = $2 \times 82 = 164$
 - 3) Untuk alternatif jawaban nilai Tidak tahu = $1 \times 18 = 18$
-
- $176 = 410$

Selanjutnya digunakan rumus :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

F = 176 (jumlah rekapitulasi jawaban alternatif)

N = 410 (hasil perkalian seluruh jawaban alternatif)

$$P = \frac{176}{410} \times 100\%$$

$$P = 42,93$$

Dari persentase rata-rata kualitatif yang diperoleh diatas adalah persentase Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam pembinaan Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, baik atau tidaknya Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan akan diberi ukuran menurut Suharsimi Arikunto (dalam Rahmad Kaulada, 2012:69) :

1. **76% - 100%** tergolong baik/ maksimal
2. **56% - 75%** tergolong cukup baik
3. **40% - 55%** tergolong kurang baik/ tidak maksimal
4. **40% - kebawah** tergolong sangat tidak baik/sangat tidak maksimal

Dari hasil rekapitulasi persentase pada tabel 5.28 dapat disimpulkan bahwa Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam pembinaan Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, **Kurang Baik/Tidak Maksimal**. Hal ini karena Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan belum sepenuhnya berperan dalam pembinaan Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan

harus lebih banyak lagi memperhatikan Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah, agar Madrasah ini dapat berkembang dengan baik dan sesuai dengan standar nasional, selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan juga harus lebih intensif dalam melakukan pembinaan di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah ini.